



126 ABK Masuk SMP

■ Pemkot Yogya Genjot Pemenuhan Guru Pendamping Khusus

YOGYA, TRIBUN - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta membuka rekrutmen untuk Guru Pendamping Khusus (GPK) yang bakal ditempatkan di SMP Negeri. Sehingga, ke depan tidak dijumpai lagi fenomena penolakan untuk anak berkebutuhan khusus, akibat kekosongan GPK.

Kepala UPT Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan dan Resource Center Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kota Yogyakarta, Aris Widodo menuturkan, tahun ini ada 14 GPK yang bakal direkrut. Mereka akan mengisi kekosongan GPK yang beberapa diantaranya sudah memutuskan beralih profesi.

"Ada beberapa yang diterima PPPK, jadi guru pengajar, kemudian ada juga yang keluar karena diterima jadi dosen dan lain-lain," urainya, Minggu (20/11).

Sementara, lanjutnya, pada tahun ini terdapat 126 siswa berkebutuhan khusus yang melanjutkan studi ke jenjang SMP di Kota Yogyakarta. Alhasil, pemenuhan GPK di sekolah negeri pada khususnya, menjadi harga mati yang wajib dilakukan Pemkot, supaya proses belajar mengajar tetap lancar dan tak terkendala.

"Sekarang kita punya 106 GPK. Tapi, Desember nanti keluar 19 orang karena diterima PPPK. Makanya, kita slapkan penggantian dari sekarang," ulasnya. Dia menjelaskan, proses rekrutmen GPK ini setidaknya mampu memenuhi jumlah minimal ketersediaan di tiap sekolah. Ia tidak menampik, untuk menunjang anak berkebutuhan khusus, idealnya dibutuhkan satu GPK di setiap sekolah, supaya konsultasi anak bisa terwadahi secara langsung di fasilitas pendidikannya.

"Kalau ada anak berkebutuhan khusus, konsultasi ke GPK di sekolahnya.

JANGAN ADA PENOLAKAN

- Pemkot Yogyakarta membuka rekrutmen untuk GPK yang bakal ditempatkan di SMP Negeri.
- Jangan sampai ada fenomena penolakan untuk ABK akibat kekosongan GPK.
- Pemkot akan merekrut 14 GPK tahun ini.
- Status para GPK itu adalah tenaga kontrak, gajinya ditanggung oleh APBD sepanjang 12 bulan.

Jadi, tiap sekolah semestinya punya GPK. Sehingga, tidak ada lagi penolakan pada siswa berkebutuhan khusus, karena sekolah tidak punya guru pendamping khusus," urainya.

"Misal, ada anak autisme, dia ada pendampingnya dan tidak ditolak. Meski kalau ada penolakan kita bisa mencarikan dia sekolah yang ada GPK-nya.

Tapi, kan, jadi tidak sesuai dengan kedekatan rumahnya, itu rawan terjadi masalah lagi," tambah Aris. Karena itu, dalam tiga tahun terakhir, pihaknya terus membuka proses rekrutmen GPK, agar kebutuhan bisa terpenuhi, terutama di jenjang SMP yang seringkali mengalami kekurangan. Adapun status para GPK itu adalah tenaga kontrak Pemkot Yogya, yang gajinya ditanggung oleh APBD sepanjang 12 bulan.

"Kalau kita lihat moratorium dari Kemenpan RB, kan, sebenarnya tidak boleh. Tapi, kami sudah konsultasi sampai ke DFR, bahwa ini kebutuhan sekolah. Kalau tidak terpenuhi, bisa kacau itu," ulasnya.

Sedangkan pendaftaran untuk calon GPK di SMP Negeri digelar secara terbuka oleh Pemkot Yogyakarta sampai 30 November 2022 mendatang. Syarat mutlak yang harus dipenuhi pendaftar GPK yakni, lulusan S1 program studi, atau jurusan pendidikan luar biasa, bimbingan konseling, maupun psikologi. "Bulan Desember (rekrutmen) sudah harus selesai, karena Januari sudah aktif. Kalau Desember ini ti-

dak selesai, kan, kasihan, gajinya baru bisa turun Februari, karena pakai sistem LPSE," ujarnya.

Pemenuhan kebutuhan Guru Pendamping Khusus sejalan dengan visi Pemkot Yogyakarta yang hendak mewujudkan sebuah kota inklusif. Di mana, tiap warga berhak mendapatkan perlakuan yang sama, tanpa memandang siapa dan bagaimana kondisinya.

"Ya, mewujudkan sebuah kota inklusif, yang tidak ada diskriminasi dan egois terhadap semua orang, tanpa melihat kondisi fisik dan sebagainya," tandas Sekda Kota Yogyakarta, beberapa waktu lalu.

Konsen Kesejahteraan
Selain di dunia pendidikan, Pemkot Yogya pun telah menaruh konsen pada kesejahteraan bagi penyandang disabilitas di lingkungannya, melalui realisasi Rumah Layanan Disabilitas di UPT Rumah Pengasuhan Anak Wiloso Projo di bawah naungan Dinas Sosial Ketenagakerjaan dan Transmigrasi.

Dijelaskannya, saat ini ada sekitar 3 ribu penyandang disabilitas di Kota Yogyakarta, termasuk di dalamnya warga yang mengalami stroke. Karena itu, ke depan, ia mematok target, fasilitasi Rumah Layanan Disabilitas akan diperluas, dengan menyasar sektor kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan disabilitas lainnya.

"Bisa ke pendidikan dan kesehatan juga. Jadi, seiring berjalannya waktu Rumah Layanan Disabilitas akan semakin berkembang lagi," tandasnya. (aka)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 23 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005